

ABSTRAK

Konflik tanah perkebunan merupakan warisan budaya Orde Baru juga banyak muncul disebabkan oleh kebijaksanaan pembangunan yang “*lapar tanah*” baik untuk fasilitas pemerintah, proyek besar, proyek konsumtif. Maupun pengembangan perkebunan. Dalam proses pengambilalihan tanah “*dikuasai*” rakyat inilah terjadi konflik kepentingan ini antara petani sebagai pemilik tanah dengan korporasi atau pemerintah. Konflik kepentingan muncul dalam bentuk perlawanan dan gerakan protes, karena kepentingan petani seringkali dikalahkan. Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan oleh penulis dalam tesis ini. *Pertama*, Penyebab timbulnya konflik perkebunan sebagai usaha pertambangan antara masyarakat dan korporasi yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah. *Kedua*, Penyelesaian konflik perkebunan sebagai usaha pertambangan antara masyarakat dan korporasi yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah. *Ketiga*, Konsep ke depannya dalam penyelesaian konflik perkebunan dan pertambangan antara masyarakat dan korporasi yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah.

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian diskriptif kualitatif. Yaitu jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan penggunaan dan pengolahan data yang terdiri dari studi dokumen, baik berupa sumber data primer, sekunder, maupun tersier dan jenis dokumen lain yang selaras tentang tema yang penulis angkat. Sementara jenis data primer penulis dapatkan melalui pendekatan *deep interview* dan wawancara terstruktur baik narasumber maupun responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, konflik yang terjadi antara masyarakat sebagai pemilik tanah dengan pihak korporasi, konflik tersebut bisa dikategorikan sebagai konflik Agraria. Bermula pada saat Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan Izin Areal Penggunaan Lain kepada pihak korporasi di dalam perkebunan masyarakat. Masyarakat yang sehari-harinya tinggal dan hidup dari hasil usaha perkebunan dipaksa untuk tunduk kepada keputusan pemerintah. *Kedua*, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah perlu melakukan upaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan kebijakan yang bertumpu pada kemitraan dan partisipasi paran pelaku pembangunan dalam mengelola sumber daya alam. Untuk itu perlu ada koordinasi dari seluruh aspek yang arahnya, adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Selain itu disadari bahwa sumber daya alam kedudukannya sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. *Ketiga*, Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berperan sentral peranannya sangat menentukan dalam kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah Daerah perlu memiliki paradigma berpikir yang *concern* sepenuhnya terhadap kepentingan masyarakat. Berbagai kebijakan yang dibuat harus menjadi dasar hubungan harmonis antara masyarakat dengan Pemerintah yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Resolusi Konflik, Perkebunan, Pertambangan, Masyarakat, Korporasi

Abstract

Plantation land conflicts are the orde baru cultural heritage, and many arise due to development policies that are "land hungry" for government facilities, large projects, consumptive projects. As well as the development of plantations. In the process of land acquisition "controlled" by the people, this conflict of interest occurs between farmers as land owners and corporations or the government. Conflicts of interest emerged in the form of resistance and protest movements, because the interests of farmers were often defeated. Based on the formulation of the problem proposed by the author in this thesis. First, the cause of the emergence of plantation conflicts as a mining business between the community and the corporation that occurred in Central Halmahera Regency. Second, Settlement of plantation conflicts as mining businesses between communities and corporations that occur in Central Halmahera Regency. Third, the future concept in resolving plantation and mining conflicts between communities and corporations that occurs in Central Halmahera Regency.

The type of this we use is qualitative descriptive research. That is the type of research with a qualitative approach to the use and processing of data consisting of study documents, both in the form of primary, secondary, and tertiary data sources and other types of documents that are in harmony with the themes that the authors adopt. While the type of primary data the author gets through the deep interview approach and structured interviews both speakers and respondents.

The results of the study show that First, the conflict between the community as the land owner and the corporation, the conflict can be categorized as an agrarian conflict. It began when the Regional Government issued a policy on other areas of use to corporate parties in community plantations. People who live and live daily from the results of plantation businesses are forced to submit to government decisions. Secondly, the Central Halmahera Regency Government needs to make efforts in realizing sustainable development, and policies that are based on partnerships and participation of the development actors in managing natural resources. For this reason there needs to be coordination from all aspects in its direction, which is environmentally sound development. In addition, it is realized that natural resources are very important for human survival. Third, Development is a conscious effort made by humans to achieve a better life, Central Halmahera District government plays a central role in determining the social life of the community. The Regional Government needs to have a thinking paradigm that is fully concerned with the interests of the community. The various policies made must be the basis of harmonious relations between the community and the Government based on environmentally sustainable development.

Kata Kunci: Resolusi Konflik, Perkebunan, Pertambangan, Masyarakat, Korporasi